

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2010-2018

Hera Fitri Yulia, Tri Sukirno Putro, dan Jahrizal

Program Pascasarjana Universitas Riau

Email: herayudhis@gmail.com

ABSTRACT

Human development is one of the long-term goals of every country, including Indonesia. Therefore every region in Indonesia, both at the provincial and district and city levels must be able to improve human development. Because basically the better human development, the better the economy of a country or region. But in reality human development in all parts of Indonesia, especially in the Riau Province region is still not evenly distributed for each district / city. Therefore, this study aims to analyze the Effect of Dimensions of Human Development Index on Economic Growth of Regencies / Cities in Riau Province in 2010-2018. This type of research used in this study is a survey research (survey research) with explanations and hypothesis testing (explanatory) using quantitative and exploratory methods. The sample in this study is the index of human development and economic growth (GRDP) from regencies / cities in Riau province since 2010-2018. This research uses path analysis and also SPSS 21.00 as an analysis tool. The results showed that: 1) Life Expectancy has no significant effect on Regency and City Economic Growth (GRDP) in Riau Province. 2) School Expectation Rate does not have a significant effect on Regency and City Economic Growth (GRDP) in Riau Province. 3) Per capita expenditure has a significant effect on Regency and City Economic Growth (GRDP) in Riau Province.

Keywords: *Life Expectancy, School Expectancy, Expenditures Per Capita, Human Development Index, and Economic Growth (GRDP)*

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Revolusi Industri 4.0 yang seolah tidak mengenal batas wilayah dan waktu, fenomena ini harus disikapi dengan cepat dan tepat agar rakyat Indonesia tetap mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri. Salah satu potensi yang harus dikelola dengan baik adalah sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dan mengantisipasi segala perubahan tersebut. Hal ini akan terwujud apabila sumber daya manusia Indonesia mampu mengimplementasikan keterampilan abad 21 dalam bidang yang ditekuninya. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun jika tidak dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka hal tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan mampu bersaing di tingkat global agar sumber daya alam dapat bermanfaat bagi hajat hidup rakyat.

Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa kasus selalu dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan gambaran keberhasilan implementasi kebijakan makro ekonomi suatu daerah yang pada akhirnya juga akan berdampak positif bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan di suatu wilayah adalah dengan melihat produk domestik regional bruto, baik di lihat atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan

berdasarkan indikator ini kita akan memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran suatu masyarakat di suatu wilayah. Informasi ini sangat dibutuhkan guna mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh para pengambil keputusan (decision market), mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan di suatu daerah. Penyusunan PDRB suatu daerah merupakan suatu upaya untuk daerah tersebut dalam memberikan informasi yang jelas tentang gambaran pembangunan ekonomi, situasi, kondisi dan potensi suatu daerah sehingga memudahkan pemerintah maupun pihak swasta dalam menentukan pembangunan di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, dihitung dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Adapun pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2010-2018

Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kuantan Singingi	3.14	4.17	5.93	5.47	5.14	-2.14	3.88	4.43	4.65	
Indragiri Hulu	2.53	5.25	8.39	6.21	5.53	-2.94	3.68	4.02	3.47	
Indragiri Hilir	4.88	7.16	7.91	7.17	6.88	2.04	4.84	4.56	3.59	
Pelalawan	3.24	5.73	3.02	5.55	6.2	2.46	2.96	4.1	3.75	
Siak	2.97	-0.52	2.07	-2.33	-0.97	-0.21	0.35	0.95	1.09	
Kampar	2.43	4.11	5.82	6.31	3.43	1.09	2.8	3	1.9	
Rokan Hulu	6.5	6.88	6.12	5.99	6.5	1.98	4.94	5.43	4.17	
Bengkalis	2.85	7.85	-0.65	-3.27	-3.85	-2.74	-2.44	-1.71	-1.62	
Rokan Hilir	3.81	-0.01	3.65	2.38	4.81	0.52	2.3	1.59	-0.12	
Kep. Meranti	2.45	6.88	6.7	4.24	4.45	2.85	3.22	3.32	4.01	
Pekanbaru	6.9	7.54	7.82	5.59	6.9	5.57	5.96	6.12	5.39	
Dumai	2.69	4.27	3.66	3.68	2.69	1.91	4.64	4.47	5.21	
RIAU	2.71	5.57	3.76	2.48	2.71	0.22	2.23	2.68	2.34	

Sumber : <https://riau.bps.go.id/>, akses November 2019.

Berdasarkan pada data di atas, maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau masih berfluktuasi, dan menunjukkan penurunan. Selain itu juga masih ada pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi.

Sementara itu menurut Todaro, (2011) sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif, manusialah yang merupakan agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia dan

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai subjek (pelaku) maupun objek (tujuan) pembangunan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Manusia adalah kekayaan bangsa. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri bukan merupakan alat dari pembangunan.

Pembangunan manusia diartikan sebagai "a process of enlarging people's choices" yang merupakan tahapan dalam peningkatan taraf hidup manusia. Hal ini terungkap dalam publikasi United Nations Development Programme (UNDP) melalui Human Development Report tahun 1996 tentang Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Pembangunan tiga aspek yang menjadi fokus perhatian dalam penghitungan IPM tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan sinergi di antara ketiganya.

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2014 telah mencapai 68,90 dan telah berstatus "sedang". Pada tingkat regional, capaian pembangunan manusia cukup bervariasi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 78,39. Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Provinsi Papua dengan IPM sebesar 56,75. Sebagian besar provinsi di Indonesia masih berstatus "sedang" dan sebagian kecil telah berhasil mencapai status pembangunan manusia "tinggi". (Badan Pusat Statistik, 2018).

Menurut United National Development Programme (UNDP), pada tingkat makro, umur harapan hidup dipakai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Apabila umur harapan hidup mengalami peningkatan maka dapat memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi penduduk dalam satu periode berakibat penurunan umur harapan hidup.

Dengan demikian maka sangat penting peranan angka harapan hidup dalam meningkatkan pembangunan manusia, dan juga pertumbuhan ekonomi. Adapun tingkat harapan hidup untuk setiap Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Angka Harapan Hidup Untuk Setiap Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau, 2010-2018

Kabupaten/ Kota	AHH (Tahun)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kuantan Singingi	67.54	67.57	67.61	67.64	67.66	67.86	67.92	67.99	68.17
Indragiri Hulu	69.51	69.53	69.6	69.63	69.64	69.74	69.79	69.83	69.97
Indragiri Hilir	66.26	66.30	66.43	66.5	66.54	66.84	66.95	67.07	67.32
Pelalawan	69.46	69.78	69.86	70.04	70.13	70.23	70.39	70.54	70.74
Siak	70.31	70.39	70.45	70.51	70.54	70.54	70.59	70.64	70.79
Kampar	69.58	69.65	69.72	69.77	69.8	70.00	70.08	70.16	70.35
Rokan Hulu	68.33	68.60	68.7	68.85	68.93	69.03	69.17	69.31	69.55
Bengkalis	70.32	70.36	70.38	70.38	70.38	70.58	70.63	70.69	70.85
Rokan Hilir	68.98	69.07	69.16	69.23	69.27	69.47	69.57	69.66	69.87
Kep. Meranti	66.06	66.17	66.29	66.38	66.42	66.72	66.85	66.99	67.21
Pekanbaru	71.42	71.46	71.51	71.54	71.55	71.65	71.7	71.75	71.94
Dumai	69.93	69.95	70.02	70.04	70.05	70.25	70.31	70.37	70.55
RIAU	70.15	70.32	70.49	70.67	70.76	70.93	70.97	70.99	71.19

Sumber : <https://riau.bps.go.id/>, akses November 2019

Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2018, Riau telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,04 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata angka harapan Hidup tumbuh sebesar 0,13 persen per tahun. Pada tahun 2010, Angka Harapan Hidup saat lahir di Riau hanya sebesar 70,15 dan pada tahun 2018 telah mencapai 71.19. Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa hanya Kota Pekanbaru yang memiliki angka harapan hidup berada di atas rata-rata provinsi. Selain itu Kabupaten/Kota lainnya memiliki angka harapan hidup di bawah rata-rata Provinsi Riau. (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau, 2017).

Berdasarkan pada Tabel 2, maka dapat dijelaskan bahwa masih banyak angka harapan hidup kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau, menunjukkan angka di bawah rata-rata provinsi, seperti Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti. Hal ini berarti bahwa kondisi angka harapan hidup (yang diukur dengan angka harapan hidup lahir) tidak merata pada setiap Kabupaten dan kota se Provinsi Riau. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah terkait dengan pembangunan manusia. Sehingga dapat meningkatkan angka indeks pembangunan manusia yang merata di seluruh Provinsi Riau.

Oleh Karena itu, penting bagi suatu negara atau daerah memperhatikan tingkat pendidikan (angka harapan sekolah) sebagai salah satu faktor pendorong pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Adapun tingkat Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. Tingkat Harapan Lama Sekolah Untuk Setiap Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau, 2010-2018

Kabupaten/ Kota	HLS (Tahun)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kuantan Singingi	11.31	11.47	11.63	11.79	11.96	12.64	12.81	13.26	13.27
Indragiri Hulu	10.8	11.2	11.25	11.29	11.51	11.92	12.24	12.29	12.32
Indragiri Hilir	10.00	10.49	10.49	10.5	10.67	11.38	11.58	11.88	11.89
Pelalawan	10.75	10.78	10.81	10.84	11.02	11.56	11.68	11.89	12.16
Siak	11.41	11.49	11.5	11.64	11.81	12.26	12.56	12.72	12.73
Kampar	11.65	11.93	12.22	12.51	12.72	12.86	12.87	13.2	13.21
Rokan Hulu	10.62	10.87	11.35	12.09	12.36	12.39	12.59	12.81	12.82
Bengkalis	12.12	12.16	12.19	12.22	12.35	12.39	12.72	12.73	12.83
Rokan Hilir	10.89	10.94	11	11.06	11.42	11.75	12.06	12.25	12.63
Kep. Meranti	11.17	11.53	11.89	12.23	12.34	12.41	12.74	12.77	12.78
Pekanbaru	13.64	13.74	13.83	13.93	14.07	14.86	14.87	14.93	15.34
Dumai	11.67	11.87	12.07	12.27	12.4	12.46	12.75	12.97	12.97
RIAU	11.76	11.78	11.79	12.27	12.45	12.74	12.86	13.03	13.11

Sumber : <https://riau.bps.go.id/>, akses November 2019

Selama periode 2010 hingga 2018, harapan lama sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0.15 per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Di tahun 2018, harapan lama sekolah di Riau telah mencapai 13.11 yang berarti bahwa anak-anak sekolah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Hingga tahun 2018, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 12.91 yang berarti secara rata-rata penduduk Riau usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan SMA/Sederajat. Namun masih ada Kabupaten/Kota yang memiliki angka harapan sekolah yang lebih rendah dari rata-rata provinsi. Terutama untuk daerah-daerah yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan. Karena tingkat rata-rata pendidikan masyarakat di daerah tersebut tidak menamatkan pendidikan SMA/Sederajat. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat indeks pembangunan manusia yang merata di seluruh Provinsi Riau, maka pemerintah harus memperhatikan tingkat pendidikan (harapan lama sekolah) di setiap Kabupaten dan Kota. (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau, 2018).

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu capaian pembangunan manusia dalam mewujudkan kehidupan yang layak terkait dengan konsumsi riil per kapita. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil per kapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Adapun tingkat pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan untuk setiap Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Pengeluaran Per Kapita Riil Untuk Setiap Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau, 2010-2018

Kabupaten/ Kota	PPP (Juta Rupiah Per Tahun)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kuantan Singingi	9,33	9,44	9,55	9,68	9,72	9,77	9,89	10,27	10,48
Indragiri Hulu	9,04	9,27	9,63	9,66	9,73	9,78	10,07	10,22	10,48
Indragiri Hilir	9,17	9,27	9,37	9,68	9,74	9,79	9,91	10,04	10,25
Pelalawan	10,33	10,44	10,79	11,34	11,39	11,42	11,64	11,73	11,89
Siak	10,87	11,05	11,22	11,40	11,53	11,60	11,83	11,90	12,12
Kampar	10,43	10,51	10,59	10,62	10,65	10,71	10,77	10,91	11,13
Rokan Hulu	8,38	8,49	8,60	8,72	8,79	8,94	9,07	9,30	9,61
Bengkalis	10,17	10,33	10,43	10,60	10,66	10,97	11,33	11,53	11,64
Rokan Hilir	8,28	8,66	8,78	8,96	9,05	9,18	9,18	9,25	9,32
Kep. Meranti	6,82	6,85	6,86	6,88	6,95	7,03	7,19	7,67	7,98
Pekanbaru	13,63	13,72	13,81	13,89	14,02	14,13	14,23	14,55	14,78
Dumai	9,59	10,16	10,50	10,74	10,87	11,06	11,53	11,70	12,06
RIAU	9,86	9,95	10,06	10,18	10,26	10,36	10,47	10,68	10,97

Sumber : <https://riau.bps.go.id/>, akses November 2019

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP). Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita masyarakat Riau mencapai Rp 10.968.000 per tahun. Selama sembilan tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat meningkat rata-rata sebesar 1,00 persen per tahun. Selain itu pengeluaran per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, masih belum rata di setiap daerah. Namun masih ada daerah-daerah yang tingkat pengeluaran per kapitanya masih berada di bawah rata-rata, seperti Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti. Tingkat pengeluaran per kapita ini menandakan kemampuan seseorang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti kebutuhan sekolah, makanan, rumah, dan lain sebagainya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi antara indeks pembangunan manusia melalui dana otonomi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan penggunaan dana otonomi khusus untuk indeks pembangunan manusia masih naik, sehingga ke depan diharapkan perlu dialokasikan sesuai dengan kebutuhan di daerah, sehingga dana otonomi khusus dapat efektif dan efisien.

Oleh karena itu penelitian ini berjudul : Analisis Dimensi Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2010-2018.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad (2015) Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Sementara Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang

dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (self generating). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk dan apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. (Sukirno, 2009 : 83).

Konsep Indeks pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan yang fokus pada manusia, pembangunan harus dilakukan secara seimbang. Seimbang antara membangun kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan. Artinya bahwa pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan kemampuan manusia saja, misalnya kemampuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, umur yang lebih panjang ataupun memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. Namun juga harus memperhatikan bagaimana manusia memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang dapat meningkatkan hidup ketingkat yang lebih baik, misalnya dengan memanfaatkan kemampuannya untuk bekerja. (BPS Provinsi Riau, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara adalah negara maju, Negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standar kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau dengan menggunakan data sekunder berupa indeks pembangunan manusia yang terdiri dari angka harapan hidup, angka harapan sekolah, pengeluaran perkapita. Selain itu juga berupa data tentang pertumbuhan ekonomi yang menggunakan indikator PDRB, dari tahun 2010-2018 per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Riau. Efektivitas adalah keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dalam satuan persentase.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi non perilaku dan dokumentasi. Metode observasi non perilaku merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, serta mempelajari

karya ilmiah berupa jurnal, disertasi, buku-buku. Serta dokumen-dokumen berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Katalog BPS: 4102002.

Sedangkan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur untuk memperoleh landasan teoritis dan data lain yang mendukung berupa buku data dan informasi, laporan keuangan daerah publikasi, dokumen, makalah, artikel dan lain-lain.

Ketepatan penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai. Kualitas data dalam pengujian tersebut adalah kualitas data penelitian yang ditentukan oleh instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan hasil yang berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Adapun pembahasan mengenai pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Angka Harapan Sekolah dan indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan uji hipotesis, yaitu sebagai berikut: t hitung (-4.025) < t tabel (1.989) dengan nilai sig. 0.000 < 0.05. Menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Dengan total pengaruh sebesar -0.739 artinya adalah bahwa setiap peningkatan variabel Angka Harapan Hidup sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan PDRB sebesar 0.739 dengan asumsi variabel lain tetap.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup.

Menurut Ranis dan Stewart (2000), menyatakan bahwa peningkatan angka harapan hidup menggambarkan membaiknya nutrisi dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan sehingga akan berpengaruh terhadap membaiknya produktivitas penduduk yang akan berdampak positif pada laju pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi harapan hidup seseorang yang berarti semakin lama usia hidup yang akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Produktivitas yang meningkat otomatis akan memicu pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Angka Harapan Sekolah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan uji hipotesis, yaitu sebagai berikut: t hitung (2.409) < t tabel (1.989) dengan nilai sig. 0.01 < 0.05. Menunjukkan bahwa Angka Harapan Sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Dengan total pengaruh sebesar 0.610, artinya adalah bahwa setiap peningkatan Angka Harapan Sekolah sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.610 dengan asumsi variabel lain tetap.

Pentingnya peranan sektor pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan multisektor di suatu daerah. Hal ini berarti bahwa penekanan kebijakan pembangunan sektor pendidikan Kabupaten sekarang tidak hanya terkait pemerataan infrastruktur pendidikan, namun yang penting adalah kebijakan yang diterapkan lebih

menekankan pada pengendalian kualitas/mutu sektor pendidikan. Hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pertumbuhan ekonomi merupakan dua mata rantai.

3. Pengaruh Pengeluaran Per Kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan uji hipotesis, yaitu sebagai berikut: t hitung (2.817) > t tabel (1.989) dengan nilai sig. $0.005 < 0.05$. Menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Dengan total pengaruh sebesar 0.506, artinya adalah bahwa setiap peningkatan Pengeluaran Perkapita sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0.506 dengan asumsi variabel lain tetap.

Menurut Hermanto dalam Fajar (2014) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari bertambah setiap tahun maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti, upah, gaji, suku bunga, sewa dan dari balas jasa bagi faktor-faktor produksi lainnya. Atas faktor-faktor produksi tersebut akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang di hasilkan perusahaan.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diuraikan tentang pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2018, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Semakin panjang usia harapan hidup maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Usia harapan hidup yang tinggi tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang semakin baik.
2. Angka harapan sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pertumbuhan ekonomi merupakan dua mata rantai. Pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dengan program ekonomi yang jelas.
3. Pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya yang dilihat dari segi ekonomi. Distribusi pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (daya beli).

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan lebih optimal dalam mengupayakan peningkatan realisasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi agar bisa benar-benar terserap oleh masyarakat guna meningkatkan IPM daerah tersebut.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk melakukan efisiensi anggaran khususnya bagi anggaran yang fungsinya bukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan bukan untuk memajukan pembangunan daerah. Kemudian mengoptimalkan anggaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik serta melakukan kontrol atau pengendalian dalam penyaluran anggaran publik tersebut agar benar-benar sampai ke sasaran program dan sasaran pembangunan.
3. Untuk mewujudkan tiga komponen pokok diatas, diperlukan adanya faktor kepemimpinan yang handal, mempunyai jaringan yang luas sampai ke tingkat pedesaan. Pemimpin di daerah bisa saja melakukan kunjungan ke desa-desa dan memberikan motivasi, dorongan dan proses pemberdayaan kepada mereka hidupnya yang kurang beruntung. Pendekatan semacam itu akan ikut mempengaruhi peningkatan IPM dan pemimpinnya sendiri akan merasa dekat di hati rakyat. Bila kita mempunyai pemimpin yang tegas, dan pemimpin itu mempunyai visi dan misi yang jelas, memiliki jaringan yang luas dan kuat, mampu menyatukan berbagai unsur masyarakat dan mampu mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dan menata lingkungan (environment) yang kondusif dan menghimpun sumber pendanaan yang mudah dijangkau masyarakat, khususnya masyarakat miskin, maka dia akan mampu meningkatkan IPM di daerahnya.
4. Bagi anak-anak yang tidak sempat mengikuti pendidikan pada umumnya, bisa saja didorong untuk mengikuti pendidikan atau kursus paket A, B dan C. Peningkatan IPM berkaitan dengan proses pengentasan kemiskinan, maka salah satu terobosan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan membentuk pos-pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Pos-pos ini dapat dipergunakan sebagai forum silaturahmi antar anggota masyarakat, agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang jelas dan dapat mengakses pendidikan, agar para orang tua memiliki motivasi untuk menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, akses kesehatan dan akses kewirausahaan, agar masyarakat mempunyai kegiatan usaha di lingkungannya dan pada akhirnya masyarakat bisa mandiri serta menghasilkan pendapatan yang lebih meningkat, sehingga dapat ikut serta menaikkan Indeks Pembangunan Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Mahyudi. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, Ghalia Indonesia. Bogor
- Aigheyisi, Oziengbe Scott. 2013. *Economic Growth and Human Development Effect of Globalization in Nigeria: Evidence in the Democratic Era*, Jurnal.
- Ari Kristin Prasetyoningrum. 2018. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Tesis.

- Aris Budi Susanto dan Lucky Rachmawati. 2018. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan. Jurnal. Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya.
- Apridar. 2012. Ekonomi Internasional, Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Asfia Murni.2013. Ekonomika Makro.PT. Refika Aditama. Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2018
- Basuki, Agus Tri and Prawoto, Nano. 2016. Analisis Regresi Dalam Penelitian. Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS. Rajawali Pers. Jakarta.
- Beik Syauqi Irfan. 2016. Ekonomi Pembangunan Syariah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Husein, Umar. 2008. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Irham Iskandar. 2017. Effect of Human Development Index Fund on Economic Growth Through a Special Autonomy. Jurnal.
- Jhingan, M. L. 2012. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Press. Jakarta
- Kuncoro, Murdijat. 2006. Ekonomi Pembangunan. Penerbit Salemba. Empat. Jakarta.
- Lincolin Arsyad. 2015. Ekonomi Pembangunan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mamatzakis, 2008. Emmanuel Constantine, "Economic Performance and Public Infrastructure: An Application to Greek Manufacturing", Jurnal.
- Mankiw N. Gregory. 2007. Principle of Economic: Pengantar Ekonomi Edisi 4. Penerbit Salemba Empat . Jakarta
- Moh Muqorrobin. 2017. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 5 Nomor 3 2017
- Nurul Izzah. 2015. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Riau Tahun 1994-2013. Jurnal At-Tijarah Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015.
- Nyoman Lilya Santika Dewi dan I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 3, Maret 2014
- Ramirez, A., G. Ranis, and F. Stewart. 1998. Economic Growth and Human Capital. QEH Working Paper No. 18.

- Smith, Adam.1776. An Inquiry into the nature and causes the wealth of nation.
William Strahan. Skotlandia
- Sudarlan. 2015. Contribution Of Human Development Index On Per Capita Income
Growth And Poverty Alleviation In Indonesia
- Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. CV Alfabeta. Bandung
- Sukirno,Sadono, 2006, Ekonomi Pembangunan. Kencana. Jakarta:
- Sukirno, Sadono, 2009. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Raja grafindo Persada.
Jakarta
- Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. 2011. Pembangunan Ekonomi Edisi 11.
Erlangga. Jakarta.
- Tulus T.H. Tambunan. 2003. Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting .
Ghalia Indonesia. Jakarta
- Schumpeter Joseph. 1911. The Thoery of Economic Development. Harvard
Publishing.